

Komunikasi Kelompok Perempuan di Kecamatan Banjarangkan Wujudkan Pembangunan Desa yang Berdaulat

I Wayan Suartawan

Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Bali Dwipa

Email: suarta1@yahoo.com

Abstrak

Pemerataan pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan merupakan tujuan setiap pemimpin. Namun, implementasinya tak semudah merencanakan. Menghadapi masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang pendidikan, mata pencaharian, pengalaman, usia maupun kepentingan yang berbeda tidaklah mudah. Diperlukan metode komunikasi yang humanis dan efektif dalam menggerakkan partisipasi kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam memanfaatkan aset desa yang dimiliki. Keterlibatan tersebut mempercepat desa mewujudkan desa yang berdaulat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dan variable yang terbatas. Data sampel yang diambil dari populasi tersebut menggunakan teknik random atau probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kelompok yang dilakukan kelompok perempuan dan kaum marjinal di desa mampu menggali potensi serta memanfaatkan asset lokal desa demi terwujudnya kedaulatan desa. Kelompok perempuan mulai aktif dalam membangun desanya sendiri.

Kata Kunci: *Komunikasi Kelompok Perempuan, Desa Berdaulat.*

Abstract

Equitable development between urban and rural areas is the goal of every leader. However, implementation is not as easy as planning. Facing Indonesian people with various educational backgrounds, livelihoods, experiences, ages and different interests is not easy. Humane and effective communication methods are needed to mobilize the participation of women and marginalized groups in utilizing the village assets they own. This involvement accelerates the village's realization of a sovereign village. This research uses descriptive qualitative research which emphasizes breadth of information, not depth, so this method is suitable for large populations and limited variables. Sample data was taken from the population using random or probability sampling techniques. The research results show that group communication carried out by groups of women and marginalized groups in villages is able to explore potential and utilize local village assets for the realization of village sovereignty. Women's groups began to be active in developing their own villages.

Keywords: *Women's Group Communication, Sovereign Village*

PENDAHULUAN

Membangun Indonesia sebagian hanya dirasakan di pusat-pusat pemerintahan saja, membangun mestinya dilaksanakan dari pinggiran dan desa. Pembangunan ini merupakan upaya mensejajarkan kondisi perdesaan dengan kota dalam berbagai aspek, sehingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hingga kini pemerataan pembangunan secara keseluruhan dirasakan belum optimal. Masih ada kesenjangan antara pembangunan di daerah perdesaan dan perkotaan. Perhatian Pemerintah Pusat dengan

pembangunan di desa mulai dirasakan warga semenjak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang ini menjadikan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan bukan sebaliknya. Diketahui, sebelum diterbitkan UU tersebut, desa dan masyarakat desa sering diibaratkan objek serta topik saat kampanye saja, tanpa implementasi nyata dari janji saat kampanye tersebut.

Melalui UU Desa, Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Desa di Indonesia. Kewenangan tersebut antara lain desa bisa mengatur serta mengelola rumah tangga serta aset desa agar bisa dipergunakan untuk kepentingan desa sendiri. Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan di desa, terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal menjalankan UU Desa, diperlukan pengetahuan serta pemahaman segenap unsur perangkat desa dan masyarakat. Sedangkan, Perangkat Desa sebagai pelaku pembangunan di tingkat desa masih minim pemahaman berbagai aturan pelaksanaan UU Desa serta aturan turunannya. Perbedaan tingkat pendidikan, faktor usia, serta berbagai kendala sumber daya manusia di desa juga menjadi kendala. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Pusat juga menyebar Pendamping Desa profesional yang bertugas mendampingi serta memberdayakan masyarakat desa.

Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan di desa, sehingga Pendamping Desa yang merupakan bagian P3MD nantinya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kelompok perempuan dan kaum marjinal. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang homogen tentu tidak mudah, diperlukan suatu metode komunikasi dan juga media yang tepat, sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perempuan dan kaum marjinal merupakan bagian dari komunikasi pembangunan.

Pemberdayaan kelompok perempuan dan kaum marjinal oleh pemerintah merupakan langkah awal pelaksanaan pembangunan di desa. Oleh sebab itu tentunya pola komunikasi pelaku pemerintahan di desa menjadi hal yang menentukan keberhasilan pemberdayaan kelompok perempuan dan kaum marjinal di desa. Disisi lain, masyarakat desa juga memiliki peran dan fungsi yang besar dalam menentukan serta membuat langkah-langkah terukur dalam mengambil keputusan, maka penyampaian informasi-informasi dalam musyawarah atau pertemuan tingkat desa khususnya pada kelompok perempuan dan kaum marjinal sangat diperlukan. Menurut Everet M. Rogers, (1999) dalam Ninik Sri Rejeki dan Anita Herawati, (1999:21) penyuluh adalah seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga. Penyuluh atau fasilitator berkewajiban untuk memberi yang masukan yang baik dalam proses pengambilan keputusan.

Lembaga-lembaga di tingkat desa atau kelompok masyarakat juga memiliki peran yang dominan dalam membangun komunikasi kelompok perempuan dan kaum marjinal di desa. Seperti kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan dari seluruh unsur masyarakat desa yang salah satu tugasnya mendampingi dan mengontrol pelaksanaan Pemerintah Desa. BPD yang terdiri dari utusan masyarakat merupakan lembaga yang berwenang dalam bidang pengawasan dan menetapkan pelbagai keputusan penting dalam musyawarah desa khususnya mendampingi musyawarah kelompok perempuan dan kaum marjinal. Disamping itu lembaga lain di tingkat desa juga dituntut meningkatkan tanggung jawab dan kualitas kerja. Wasito Utomo (2006 : 3) menyebutkan bahwa birokrasi pemerintahan dan instansi apapun menuntut agar didalam pelayanan kepada publik atau masyarakat agar lebih prima dan memberikan yang terbaik.

Disamping BPD, Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab, wewenang serta hak mengelola potensi desa sesuai dengan UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Pelaku pembangunan di tingkat desa ini sangat penting peranannya bagi tercapainya tujuan bersama, yaitu yang terwujudnya masyarakat desa yang berdaulat. Sebab melalui pelaku pembangunan di tingkat desa, berbagai undang-undang dapat disosialisasikan dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kaum

marjinal. Perangkat Desa dan seluruh pelaku di tingkat desa maupun kecamatan dapat dikatakan pusat ataupun motor dalam melakukan proses penyebaran informasi, proses penerangan, proses serta perubahan perilaku. Seperti pendapat berikut menyebutkan bahwa proses pendidikan dan pemberdayaan sebagai rakayasa sosial (Madikanto, 1993: 11-17).

Komunikasi kelompok perempuan dan kaum marjinal dengan pelaku pembangunan di desa merupakan modal awal pemerataan pembangunan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui saluran dan menimbulkan efek tertentu. Dalam definisi lain juga dijelaskan secara singkat bahwa komunikasi adalah cara berhubungan yang ditujukan pada orang lain atau massa/kelompok dengan menggunakan alat-alat komunikasi atau tanpa alat komunikasi yaitu komunikasi yang secara langsung berhadapan-hadapan atau *face to face* (Sihite, 2000: 49).

Menurut Rogers dan D. Lawrence (dalam Hafied Cangara, 2003:19) menyatakan komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam. Dari beberapa pengertian komunikasi diatas setidaknya komunikasi memiliki beberapa unsur seperti yang dikemukakan Hafied Cangara, (2004:23), adalah sebagai berikut, yakni: (1) sumber atau *source* dan penerima atau *receiver*. (2) pesan atau *message*, (3) media atau *channel*, dan (4) efek. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka menjadi semakin sulit membedakan antara media komunikasi massa dengan komunikasi kelompok. Sehingga semakin kabur untuk kita dalam memberikan definisi yang tepat. Misalnya saja internet bisa digunakan sebagai media untuk komunikasi antar pribadi dengan adanya surat elektronik atau e-mail. Akan tetapi juga dapat digunakan sebagai media massa, dalam hal ini jika internet dipergunakan untuk *website* yang berisi informasi-informasi yang sifatnya untuk disampaikan pada khalayak ramai.

Sementara itu, di desa-desa masih banyak menggunakan media tradisional, media komunikasi tradisional biasanya dilaksanakan pada kegiatan dan tempat-tempat tertentu, seperti tempat suci atau pura, balai banjar, balai desa, panggung kesenian, pesta rakyat, termasuk juga kegiatan keluarga yang dapat dikatakan sebagai media komunikasi kelompok dan tradisional.

Menurut Efendi Gazali (dalam Ngalimun, 2017: 33), menyatakan komunikasi juga mesti saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan. Efendi Gazali, menjelaskan fungsi komunikasi ada empat fungsi utama komunikasi yaitu:1) Menginformasikan (*to inform*), yakni memberikan informasi kepada orang lain tentang sesuatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, kebijakan, peraturanmaupun segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain; 2) Mendidik (*to educate*), yakni sebagai sarana pendidikan, karena melalui komunikasi, manusia dalam suatu lingkungan dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk informasi yang kita berikan; 3) Menghibur (*to entertain*), komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain; 4) Mempengaruhi (*to influence*). Selain sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan, informasi dan sebagai sarana dalam menghibur orang lain, komunikasi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini dipilih peneliti karena peneliti menghendaki data yang berasal dari penelitian yang berupa hasil pengukuran presentase, dimana jenis dan jumlah indikator variabelnya ditentukan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2009:12), pada umumnya penelitian kualitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dan variable yang terbatas. Selanjutnya data yang diperoleh adalah data

sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik random atau *probability sampling*. Berdasarkan data dari sampel tersebut, selanjutnya peneliti membuat generalisasi atau kesimpulan sampel diberlakukan ke populasi dimana populasi tersebut diambil.

Dalam hal mendapatkan data, peneliti juga meneliti secara acak informan di wilayah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, mulai dari kepala desa (perbekel), tokoh masyarakat, pedagang, kelompok perempuan, kaum marjinal dan masyarakat umum. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis, yakni: (1) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui media bukti wawancara. Teknik yang dilakukan oleh penulis dan informan (sumber informasi) dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal yang akan diteliti. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder dan kamera untuk foto; (2) Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi; (3) Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan dan proses analisis dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data yang nantinya akan dianalisis sehingga data bisa disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah diimplementasikan. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data atau melalui tiga tahapan model alir dari (Miles dan Huberman dalam Burhan Bungin, 2001: 297) yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat perempuan dan kaum marjinal di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sebenarnya tidak bisa lepas dari komunikasi kelompok antar pelaku pemberdayaan di desa. Mengacu pada kata "*Empowerment*", yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan komunikasi kelompok perempuan dan kaum marjinal pada pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Banjarangkan dalam pengembangan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya peran masyarakat local, terutama kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam membangun desa, sehingga mereka mampu membentuk sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu dan kelompok perempuan dan kaum marjinal bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia, khususnya kelompok perempuan dan kaum marjinal (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal di Kecamatan Banjarangkan. Pemberdayaan tersebut merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Kecamatan Banjarangkan khususnya kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam mengaktualisasikan dirinya terutama menggali potensi-potensi yang dimiliki. Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program pemerintah yang dipayungi UU No. 06 Tahun 2014. Program ini bertujuan menangani masalah kemiskinan dan mengembangkan potensi desa guna terwujudnya peningkatan dan pengentasan kemiskinan dan menuju tercapainya *Millenium Development Goals* atau MDGs.

Lewat UU tentang Desa, pemberdayaan kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam masyarakat di Kecamatan Banjarangkan dilakukan dengan menyelaraskan permasalahan yang dimiliki, serta membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Peran pemerintahan desa dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber

penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat marjinal dan kelompok perempuan desa. Media masyarakat dalam memberdayakan dirinya ada pada kegiatan musyawarah, pertemuan dengan komunikasi kelompok-kelompok tertentu, pelatihan serta diskusi-diskusi kecil yang lokasinya sembarang.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat perempuan dan kaum marjinal di Kecamatan Banjarangkan dalam menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Desa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan acuan UU Desa Tahun 2014 yang melibatkan masyarakat dimaksud dengan *pro poor*. Melalui acuan tersebut APBDesa dirumuskan kembali agar selaras dengan upaya memberdayakan kelompok perempuan dan kaum marjinal desa. Mereka dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan tersebut. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan kaum marjinal dapat ditumbuh kembangkan, sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dari partisipasi yang diikuti tersebut, masyarakat perempuan dan kaum marjinal di Kecamatan Banjarangkan sebagian besar sebagai petani, tidak semua mengenal internet dan sebagian dari masyarakat juga masih mendengarkan radio dan menonton televisi, bahkan mereka paling sering berinteraksi saat ada kegiatan keagamaan yang mana didalamnya juga ada proses komunikasi kelompok dengan media tradisional. Jika proses sosialisasi dilakukan dengan media yang salah sudah tentu tidak akan mencapai sasaran. Masyarakat Kecamatan Banjarangkan secara umum masih kental dalam pelaksanaan tradisi, budaya, sehingga interaksi antar individu dan kelompok secara langsung masih sangat tinggi. Seperti yang diungkapkan Rogers dan Shoemaker (1987) mengatakan bahwa diantara saluran komunikasi yang ada, saluran interpersonal dan kelompok masih memegang peranan penting dibanding dengan media-media lainnya, terlebih di Negara yang belum maju, dimana kurang tersedianya media massa yang banyak menjangkau khalayak, terutama warga perempuan dan kaum marjinal di Kecamatan Banjarangkan, yang lemah tingkat literasi medianya.

Situasi tersebut mengharuskan pelaku pemberdayaan masyarakat di desa harus mampu mengajak partisipasi masyarakat perempuan dan kaum marjinal terlibat dalam berbagai pembangunan, apakah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sehingga implementasi UU Desa sesuai arah. Ajakan tersebut akan berat tanpa diimbangi komunikasi yang baik antara kelompok perempuan, kaum marjinal di desa dengan pelaku pemberdayaan. Masyarakat marjinal dan kelompok perempuan akan berkomunikasi secara berkelompok tentang apa yang bisa membuat mereka sejajar dari pembangunan di kota. Mereka juga diajak merumuskan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam membangun desa, sehingga kemiskinan, lapangan pekerjaan terbuka di desa.

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. UU Desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, UU Desa mengonstruksi cara pandang baru praktis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa diakui dan dikukuhkan sebagai subjek yang mesti mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kebutuhan masyarakat perempuan dan kaum marjinal akan bisa diselaraskan dengan melibatkan mereka aktif dalam pembangunan.

Perubahan dan paradigma baru atas desa itu sangat penting mengingat kondisi objektif dan dinamika desa-desa di Indonesia yang secara umum masih memprihatinkan. Desa identik dengan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dibarengi dengan memberikan hak-hak desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial yang memadai guna melaksanakan kewenangannya,

sebagaimana ditegaskan UU Desa, menjadi faktor penggerak peningkatan pembangunan desa yang sekaligus menjadi ruang krusial implementasi UU Desa. APBDes yang disusun seluruh desa di Kecamatan Banjarangkan selaras dengan kebutuhan kelompok perempuan dan kaum marjinal, hal tersebut membuat lapangan pekerjaan dan aset desa yang perlu dikembangkan menjadi optimal untuk desa dan masyarakat setempat.

Dalam kerangka itulah, Pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan khusus kepada kelompok perempuan dan kaum marjinal sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan: (1) meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; (2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; (3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan (4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Dari data hasil kuisisioner yang disebarkan ke para responden yang merupakan kelompok perempuan, kaum marjinal serta pelaku pemberdayaan di masing – masing desa, maupun masyarakat yang menjadi sasaran dari program dan dipilih secara acak dengan metode sampling, menyatakan kelompok perempuan dan kaum marjinal selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengembangkan aset maupun potensi desa. Partisipasi kelompok perempuan dan kaum marjinal dimulai sejak perencanaan pembangunan di tingkat dusun dan tingkat desa, pelaksanaan di tingkat desa hingga pengawasan. Sehingga hal tersebut mampu mempercepat pemerataan pembangunan di desa.

Responden memilih pertemuan langsung merupakan cara yang paling sering mereka lakukan dalam menentukan keputusan atau dalam musyawarah, yaitu sebanyak 55 responden dari 66 responden atau 85%, dan sebagian besar tidak pernah mengetahui sosialisasi melalui media komunikasi massa, karena memang media komunikasi massa jarang dipergunakan, selain jarang di pergunakan dalam bersosialisasi, media tersebut tidak bisa membuat masyarakat mengerti secara keseluruhan tentang program dan menghabiskan biaya yang cukup tinggi.

Hasil responden juga menyatakan di beberapa golongan masyarakat tertentu, ada juga yang membaca koran, website, situs online dan media sosial, mereka sebagian besar kalangan pelajar, dan beberapa orang yang tingkat pendidikannya atau memiliki kecukupan ekonomi lebih tinggi. Pemanfaat media ini juga hidup merantau dan kebanyakan dari mereka bukan pelaksana program tingkat desa dan juga jarang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Pada umumnya mereka mengetahui melalui media komunikasi khususnya media massa dan media sosial.

Dari data tersebut dapat diperoleh data bahwa masyarakat miskin, kelompok perempuan dan kaum marjinal dan pelaku pembangunan di Kecamatan Banjarangkan yang tersebar di seluruh desa, memilih dan menyatakan bahwa pertemuan langsung adalah yang paling banyak dipergunakan dan dipakai yang bisa membuat masyarakat mengerti maksud dan tujuan pembangunan. Dari hasil wawancara dapat diperoleh bahwa komunikasi langsung antar kelompok perempuan dan kelompok marjinal dengan bertatap muka adalah komunikasi yang paling disukai oleh masyarakat, karena bisa membuat mereka mengerti dan mendapatkan informasi yang jelas. Tetapi di kalangan masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan, mereka menyatakan bahwa penggunaan media komunikasi dan media massa atau media sosial adalah hal yang paling menarik.

SIMPULAN

Simpulan dari data tersebut bahwa masyarakat dan pelaku pembangunan di Kecamatan Banjarangkan yang tersebar di seluruh desa, memilih dan menyatakan bahwa komunikasi kelompok adalah yang paling banyak dipergunakan dan dipakai yang bisa membuat masyarakat mengerti maksud dan tujuan program pembangunan. Dari hasil

wawancara dapat diperoleh bahwa komunikasi kelompok dan bertatap muka adalah komunikasi yang paling disukai oleh masyarakat secara umum, karena bisa membuat mereka mengerti dan mendapatkan informasi yang jelas. Tetapi di kalangan masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan di desa, mereka menyatakan bahwa penggunaan media komunikasi dan media massa atau media sosial adalah hal yang paling menarik, namun presentase masih kecil.

Tahapan komunikasi kelompok yang dilakukan kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam mewujudkan aset desa secara emansipatoris yakni: (1) Diawali dengan mengikuti sosialisasi ke banjar/dusun di seluruh Kecamatan Banjarnegaran. Pelaku pemberdayaan bersama pihak terkait langsung bertemu dengan kelompok masyarakat di banjar atau dusun, khususnya kelompok perempuan dan kaum marjinal; (2) Dengan melaksanakan musyawarah desa perencanaan khusus perempuan, yang diikuti khusus kelompok perempuan. Musyawarah desa ini dilaksanakan setelah semua dusun melaksanakan musyawarah sosialisai tingkat dusun, setelah itu pelaku pemberdayaan dan Pemerintah Desa akan segera melaksanakan musyawarah desa. Musyawarah desa khusus perempuan merupakan salah satu musyawarah yang wajib dilaksanakan. Dimana dalam musyawarah ini hanya diikuti oleh para perempuan dan mendapatkan prioritas pertama dalam menyerap anggaran di APBDes bersangkutan. Mereka membuat berbagai usulan yang mengutamakan kepentingan kaum marjinal dan kelompok perempuan; (3) Musyawarah kelompok campuran, merupakan media komunikasi kelompok yang dilakukan antar berbagai kelompok di desa. Musyawarah ini merupakan musyawarah yang memprioritaskan penggunaan APBDes dalam berbagai kegiatan. Peserta musyawarah ini berasal dari seluruh komponen kelompok di desa, seperti, kelompok perempuan, kaum marjinal, kelompok pemuda, lansia dan masyarakat umum.

Musyawarah serta seluruh tahapan yang dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan kedaulatan desa yakni: (1) meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin, kelompok perempuan dan kaum marjinal secara mandiri di desa; (2) meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; (4) meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*); (5) meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; (6) meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; (7) meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; (8) meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberdayaan serta upaya mengoptimalkan aset desa secara emansipatoris melalui masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri. Sehingga terwujud cara untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*communitybased resource management*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2008. *Teori Sosial Kritis(Terjemahan)* Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Anonimus. 2006. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Semarang: Dahara Prize.

- Briggs, Asa. Burke, Peter. 2000. *A Sosial History of the Media*. Polity Press. Cambridge UK.
- Bjorn, Hattne. 1982. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Harapan
- Cangara, H. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Dalam Negeri. 2008. *Petunjuk Teknis Oprasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta.
- Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2010. *Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan*. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjahna. 1992. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Effendy, Onong Uchjahna. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluh Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Sebelas Maret Univeristy Press
- McQuail, Dennis. 1987. *Mass Communication Theory, An Introduction (2nd)*. Newbury Parks Sage
- Mulyana, Dedy. 1999. *Membangun Komunikasi yang Humanistik*. Bandung: Rosda
- Mulyana, Dedy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mulyana, Deddy , 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Poerwardarminta. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. *Cetakan Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ruslan, Rosady. SH.MM. 2008. *Manajemen Pulic Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Senjaya, Sasa Djuarsa. 1993. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sumadi Dilla. 2006. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media
- Sugiyono, Pof. Dr. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Wolton, Dominique. 2007. *Kritik Atas Teori Komunikasi : Kajian Dari Media Konvensional Hingga Era Internet* (terjemahan : Ninik Rochani Sjams) Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Werner J. Sesein, 2006. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Prenada Mulia